SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227
Jl. Cisadane No.25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330
website: www.komnasham.go.id email: info@komnasham.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 18/KP.02.00/VIII/2024

TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2024

Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Setjen Komnas HAM) memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Lingkungan Setjen Komnas HAM.

I. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melakukan pendaftaran *online* di SSCASN 2024;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
9. Berkemampuan jasmani dan rohani;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
13. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja (MPK) minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB);
14. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Indek Prestasi Komulatif (IPK) bagi pelamar Umum: 2,85.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

II. Dokumen Persyaratan

A. Dokumen Persyaratan Formasi Umum
1. Pas foto formal terbaru dengan latar belakang warna merah;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan Pengganti Sementara KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
3. Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai, format surat lamaran dapat diunduh melalui laman: *https://sscasn.bkn.go.id.* atau pada lampiran II pengumuman ini;
4. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai, format surat pernyataan dapat diunduh melalui laman: *https://sscasn.bkn.go.id.* atau pada lampiran III pengumuman ini;
5. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
6. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;

B. Dokumen Persyaratan Formasi Khusus
1. Pelamar jenis kebutuhan **Penyandang Disabilitas**
   a. Pas foto formal terbaru dengan latar belakang warna merah;
   b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan Penganti Sementara KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
   c. Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai, format surat lamaran dapat diunduh melalui laman: *https://sscasn.bkn.go.id.* atau pada lampiran II pengumuman ini;
   d. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai atau pada lampiran III pengumuman ini;
   e. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
   f. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
   g. Surat keterangan asli dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dalam 1 (satu) *file* format pdf; dan
   h. Video singkat dengan durasi 2 sampai 3 menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan mengirimkan video dengan mengirimkan *link file* video yang sebelumnya sudah diunggah pada *g-drive* masing-masing pelamar dikirimkan melalui email *aduanseleksicpns@komnasham.go.id*, dengan subjek *email* “video singkat pelamar CPNS”.

2. Pelamar jenis kebutuhan **Putra/Putri Kalimantan**
   a. Pas foto formal terbaru dengan latar belakang warna merah;
   b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan Penganti Sementara KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang menunjukkan pelamar adalah asli Putra/Putri Kalimantan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai, format surat lamaran dapat diunduh melalui laman: *https://sscasn.bkn.go.id.* atau pada lampiran II pengumuman ini;
d. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai atau pada lampiran III pengumuman ini;
e. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
f. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pendaftaran *online* dan unggah dokumen persyaratan dengan format **PDF** dilakukan pada tanggal **20 Agustus 2024 s.d 6 September 2024** melalui portal *https://sscasn.bkn.go.id.*

III. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal *https://sscasn.bkn.go.id* mulai tanggal 20 Agustus 2024 s.d 6 September 2024;
2. Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran secara daring dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran secara daring;
3. Dalam melakukan pendaftaran, pelamar terlebih dahulu harus membuat akun pada laman *https://sscasn.bkn.go.id.* sesuai tata cara yang tertera pada laman dimaksud.

IV. Jadwal Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman hasil Seleksi Administrasi	14 September s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi *)	18 September s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 September s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 September s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 September s s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEGIATAN	JADWAL
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 Oktober s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 Oktober s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 November s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 November s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 November s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 November s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 Desember s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 Desember s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 Januari s.d. 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 Januari s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 Januari s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 Januari s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 Januari s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

***) Bagi pelamar yang menggunakan hasil nilai SKD tahun anggaran 2023, perlu melakukan konfirmasi melalui aplikasi SSCASN**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

V. Tahapan Seleksi

1. Tahapan Seleksi Pelamar dengan jenis kebutuhan **Umum dan Khusus (Penyandang Disabilitas, Putra/Putri Kalimantan)**
   a. Seleksi Administrasi Verifikasi Dokumen Persyaratan diunggah melalui laman *https://sscasn.bkn.go.id*.
   b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara dengan bobot 40%;
   c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara dengan bobot 60%.
2. Lokasi pelaksanaan seluruh tahapan seleksi akan disampaikan pada pengumuman selanjutnya.

VI. Sistem Kelulusan

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman: *https://komnasham.go.id/seleksicpns*. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman: *https://sscasn.bkn.go.id*;
2. Kelulusan Seleksi Komputer Dasar (SKD) meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), Tes Karakteristik Pribadi (TKP) berdasarkan nilai kumulatif tertinggi untuk SKD dengan didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
3. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD akan mengikuti SKB;
4. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

VII. Lain-Lain

1. Pengumuman penerimaan dilakukan melalui website resmi Seleksi CPNS Komnas HAM Tahun 2024 (*https://komnasham.go.id/seleksicpns*);
2. Untuk dokumen yang menggunakan e-meterai 10.000, **setiap 1 (satu) e-meterai hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis dokumen**;
3. Untuk dokumen yang menggunakan e-meterai 10.000 pelamar tidak perlu mencetak dokumen fisik, namun cukup mengunggah dokumen hasil unduhan yang telah dibubuhi e-meterai;
4. Pelamar diminta agar penempatan e-meterai 10.000 tidak tumpang tindih dengan tanda tangan digital yang dibubuhkan agar tidak mengganggu proses validasi e-meterai,;
5. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
6. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
7. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
8. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

10. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi CPNS Setjen Komnas HAM, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
11. Jika dalam mengikuti tahapan seleksi CPNS terbukti peserta seleksi melanggar aturan dan ketentuan maka Panitia Seleksi berhak menggugurkan kepesertaan yang bersangkutan;
12. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/ tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
13. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
14. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
15. Semua pelamar disarankan dapat mengakses dan mempelajari bahan pada tautan *https://www.komnasham.go.id/*, dan untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat di *https://komnasham.go.id/seleksicpns*. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS pada Setjen Komnas HAM Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi Call Center: 021 23599034 pada hari Senin s.d. Jumat Pukul 08.30 s.d. 15. 30 WIB, serta Instagram: komnas.ham (selama masa seleksi berlangsung).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2024
Sekretaris Jenderal,
Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian



Henry Silka Innah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN I PENGUMUMAN
NOMOR : 18/KP.02.00/VIII/2024
TENTANG PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2024

JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JALUR FORMASI, JUMLAH FORMASI DAN PENEMPATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	AUDITOR TERAMPIL	D-III AKUNTANSI; D- III ADMINISTRASI BISNIS; D-III ADMINISTRASI PAJAK; D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN; D-III AKUNTANSI PERPAJAKAN; D-III MANAJEMEN KEUANGAN; D-III MANAJEMEN PEMASARAN; D-III STATISTIKA; D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	3	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL
2	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN; S-1 HUKUM; S-1 HUKUM BISNIS; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 SAINS POLITIK	UMUM	3	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
3	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 SAINS POLITIK; S-1 HUKUM; S-1 HUKUM BISNIS	UMUM	4	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
			KHUSUS (PENYANDANG DISABILITAS)	1	

4	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN; S-1 HUKUM; S-1 HUKUM BISNIS; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 SAINS POLITIK	UMUM	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | BIRO UMUM | BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL | SUBBAGIAN TATA USAHA ANGGOTA KOMNAS HAM DAN PROTOKOL
5	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL
6	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	2	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
7	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA

8	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
9	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM I SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | BIRO UMUM | BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL | SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT JENDERAL
			PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	1	
10	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER; S-1 ILMU INFORMATIKA: S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 REKAYASA KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	2	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
11	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III MANAJEMEN; D-III ADMINISTRASI PUBLIK; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM I SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | BIRO UMUM | BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL | SUBBAGIAN TATA USAHA ANGGOTA KOMNAS HAM DAN PROTOKOL

12	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III MANAJEMEN; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	3	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
13	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III MANAJEMEN; D-III ADMINISTRASI PUBLIK; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	UMUM	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM I SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | BIRO UMUM | BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL | SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT JENDERAL
14	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III ADMINISTRASI PUBLIK; D-III MANAJEMEN	UMUM	6	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
15	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV KOMUNIKASI MASSA: D-IV LAYANAN PUBLIK; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 STUDI PEMERINTAHAN; S-1 SOSIOLOGI; S-1 SAINS KOMUNIKASI; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 HUKUM BISNIS	UMUM	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI MALUKU

16	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV KOMUNIKASI MASSA; D-IV LAYANAN PUBLIK; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 STUDI PEMERINTAHAN: S-1 SOSIOLOGI: S-1 SAINS KOMUNIKASI:S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL; S-1 ILMU KOMUNIKASI: S-1 ILMU INFORMASI: S-1 HUKUM BISNIS	UMUM	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SUMATERA BARAT
17	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV KOMUNIKASI MASSA: D-IV LAYANAN PUBLIK; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 STUDI PEMERINTAHAN; S-1 SOSIOLOGI; S- 1 SAINS KOMUNIKASI: S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 ILMU INFORMASI; S-1 HUKUM BISNIS	UMUM	1	SEKRETARIAT JENDERAL KONAS HAM | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI PAPUA
18	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV KOMUNIKASI MASSA; D-IV LAYANAN PUBLIK; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 STUDI PEMERINTAHAN; S-1 SOSIOLOGI; S-1 SAINS KOMUNIKASI; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL; S-1 ILMU INFORMASI; S-1 HUKUM BISNIS	UMUM	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI ACEH

19	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV KOMUNIKASI MASSA: D-IV LAYANAN PUBLIK; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S- 1 STUDI PEMERINTAHAN: S-1 SOSIOLOGI; S- 1 SAINS KOMUNIKASI: S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL; S-1 ILMU KOMUNIKASI: S-1 ILMU INFORMASI: S-1 HUKUM BISNIS	UMUM	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM I SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
20	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV KOMUNIKASI MASSA: D-IV LAYANAN PUBLIK; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S- 1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S- 1 STUDI PEMERINTAHAN; S-1 SOSIOLOGI; S-1 SAINS KOMUNIKASI; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 ILMU INFORMASI; S-1 HUKUM BISNIS	UMUM	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN II SURAT LAMARAN

....., ……. 2024

Yth. Sekretaris Jenderal Komnas HAM
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Pendidikan	:
Jabatan yang dilamar	:
Alamat Domisili	:

Dengan ini menyatakan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pas foto formal terbaru dengan latar belakang warna merah;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan Pengganti Sementara KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
3. Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
4. Surat lamaran yang ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sesuai dengan Lampiran Pengumuman II, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
5. Ijazah asli (bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan);
6. Transkrip Nilai asli (bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan).

Bagi Pelamar kebutuhan khusus (penyandang disabilitas):

1. Surat keterangan asli dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dalam 1 (satu) *file* format pdf; dan
2. Video singkat dengan durasi 2 sampai 3 menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan mengirimkan video dengan mengirimkan link file video yang sebelumnya sudah diupload pada *g-drive* masing-masing pelamar dikirimkan melalui email *aduanseleksicpns@komnasham.go.id*, dengan nama folder “video singkat pelamar CPNS”.

Demikian surat lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

e-meterai
10.000

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN III SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

……..…, ……. 2024

Yang Membuat Pernyataan,

e-meterai
10.000

(Nama Lengkap)